

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LINGGA
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
TAHUN 2015**

JURNAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji



Oleh:

DEBY AVIANTARI NOVERIA

130565201036

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2018

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LINGGA
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
TAHUN 2015**

Deby Aviantari Noveria, Afrizal, Uly Sophia

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: debyaviantarinoveria06@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang menjadi salah satu sektor perekonomian yang penting bagi negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan dan terkenal sampai ke mancanegara. Namun sangat disayangkan beberapa potensi tersebut belum dikelola dengan maksimal sehingga belum dapat memberikan manfaat yang banyak dan kontribusi ke masyarakat maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mengingat potensi tersebut, maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Selain itu, sebagai pedoman lainnya dibuatlah Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (Agustiono, 2012:142). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, tidak adanya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pada tahun 2015, *Kedua*, Sumberdaya Manusia dilingkungan masyarakat masih minim sedangkan jika dilihat dari jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga ini yaitu 53 Orang, Sumberdaya Finansial yang terealisasi hanya sebesar 45.739.800. Sumberdaya Waktu tidak dapat berjalan sesuai target. *Ketiga*, Agen pelaksana sudah berkerja dengan baik, baik individual maupun tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, baik dalam bidang kerjanya maupun antar bidang kerja. *Keempat*, adanya dukungan dari pelaksana internal Pemerintah, adanya antusiasme masyarakat, adanya Pengawasan Pemerintah yang bersifat melekat pada pengembangan pariwisata di Daerah. *Kelima*, Koordinasi/kerjasama dengan stakeholder atau instansi terkait yang mana koordinasi yang terjadi sudah cukup baik. *Keenam*, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Memutar roda ekonomi masyarakat, masyarakat ikut berpartisipasi, adanya dukungan para elit politik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan dan Pariwisata

ABSTRACT

Tourism is one of the sectors development that continues to berkembang menjadi one of the important economic sector for countries all over the world, including Indonesia. Kabupaten Lingga has a range of tourism potential that is large enough to be developed and famous get to foreign tourists. Unfortunately some of the potential is not yet being managed by maksimal sehingga have not been able to provide many benefits and contributions to the community or region. This is due to several factors. Given the potential of these local governments make policies in the Regulatory area of the Regency Lingga No. 13 Year 2011 about the Organization of Tourism. In addition, other guidelines as a single strategic plan (RENSTRA) Department of culture and tourism of Lingga Regency. The theory used in this study by using the theory of Van Meter and Van Horn (Agustiono, 2012:142). The research method used is descriptive qualitative approach. Engineering data collection performed is observation, interview and documentation. The results of this research it can be concluded that the first, the absence of a standard Operational Procedure (SOP) in the year 2015, the second, the human resources community is still minimal surroundings whereas if viewed from a number of employees at the Department of culture and tourism Lingga Regency is 53 people, Financial Resources is realized only in the amount of 45,739,800. The resource of time can not run appropriate targets. Third, Implementing Agencies already work well, either individual or team in accordance with the basic tasks and functions of each employee, whether in the field of work or between work areas. Fourth, the existence of the support of the Government's internal implementing, the enthusiasm of the community, the existence of Government oversight that is attached to the development of tourism in the area. Fifth, Coordination/cooperation with stakeholders or related institutions which coordination occurred already good enough. Sixth, the economic, social and Environmental politics, Turning wheel of economic society, community participation, support of political elites.

Keywords: Implementation, Policy and Tourism

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki suatu wilayah yang sangat luas dengan keanekaragaman yang tercermin dalam satu ikatan Kesatuan yang terkenal dengan Bhineka Tunggal Ika. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal diberbagai daerah serta keanekaragamannya tersebut, maka pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan Nasional lebih diarahkan dalam pengembangan daerah bertujuan untuk menserasikan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan didukung oleh sumber daya alam yang beraneka ragam dalam hal ini yaitu pariwisata, baik wisata alam, sejarah maupun budaya yang tersebar di setiap wilayahnya, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu perlunya pembangunan kepariwisataan, sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pasal 5 ayat (1) bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi; a). Industri Pariwisata b). Destinasi Pariwisata c). Pemasaran Pariwisata dan d). Kelembagaan Pariwisata. Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Provinsi Kepulauan Riau sendiri merupakan salah satu provinsi ke 32 di Indonesia yang juga memiliki kekayaan akan potensi pariwisata yang bagus dan tidak kalah menarik dengan provinsi yang lainnya. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai Luas Wilayah 251.810,71 Km² dengan Luas Daratan sebesar 10.595,41 Km² dan Luas Lautan sebesar 241.215,30 Km² (Provinsi Kepulauan

Riau dalam Angka 2016). Berdasarkan luas wilayah yang dimilikinya tersebut dapat dilihat bahwa Kepulauan Riau memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Luas Kawasan pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu seluas 28.324 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha berdasarkan (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Dalam hal ini, pengembangan pariwisata merupakan upaya atau usaha yang dilakukan dengan tujuan memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada Kabupaten Lingga yang merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak yang berada di daerah Provinsi Kepulauan Riau yang pastinya memiliki potensi pada pengembangan pariwisata. Melihat dari kondisi geografis, Kabupaten Lingga mempunyai Luas Wilayah 211.772 Km² dengan Luas Daratan 2.117,72 Km² (1%) dan Luas Lautan mencapai 209.654 Km² (99%) (Kabupaten Lingga dalam Angka 2016). Hal ini sangat mendukung pada pengembangan pariwisata bahari, namun tidak hanya itu saja potensi wisata lain yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lingga dapat berupa wisata Budaya dan Sejarah, hal ini didukung dengan sejarah berdirinya Kerajaan Riau-Lingga yang pernah berdiri kokoh di Ibu Kota Kabupaten

yang banyak meninggalkan situs-situs Sejarah dan Budaya yang dapat dijadikan objek wisata.

Adapun banyaknya Objek Wisata menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2015 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Banyaknya Objek Wisata Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lingga
Tahun 2015

Kecamatan		2015		
		Wisata Alam (A)	Wisata Bantun/Sejarah (B)	Wisata Alam/Bahari/Marine (A/B/M)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Singkep Barat	5	1	1
2	Singkep	5	6	5
3	Singkep Selatan	-	-	2
4	Singkep Pesisir	2	-	1
5	Lingga	12	9	4
6	Selayar	1	3	2
7	Lingga Timur	-	1	6
8	Lingga Utara	2	-	1
9	Senayang	14	1	4
Jumlah		41	21	26
Total Keseluruhan		88		

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga. 2015

Keterangan:

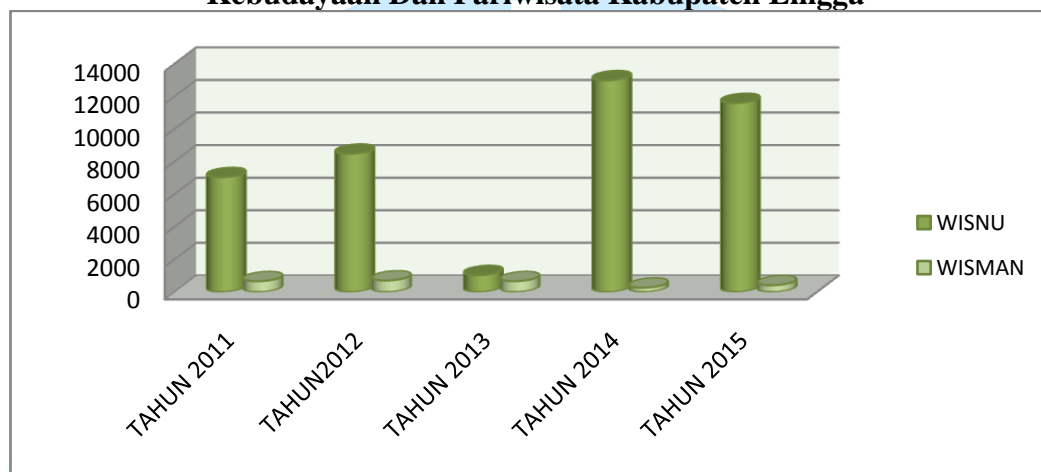
Wisata Alam (A) : 41
 Wisata Bantun/ Sejarah (B) : 21
 Wisata Alam/Bahari/Marine (A/B/M) : 26

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lingga mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, yang tidak hanya menikmati keindahan alam yang disajikan mereka juga diharapkan memberikan dampak pada pertukaran uang sehingga dapat menjalankan roda ekonomi masyarakat sebagai mana pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kepariwisataan pasal 3 huruf (a) salah satunya berbunyi penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan Pendapatan Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.

Adapun data angka pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2011-2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga yaitu sebagai berikut:

Grafik I.1
Grafik Angka Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 2011 - 2015 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lingga



	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
WISNU	7051	8489	1038	12996	11602
WISMAN	664	707	665	266	419

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga 2015

Dapat dilihat bahwa grafik angka pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2011-2015 diatas mengalami pasang surut. Yang mana wisatawan nusantara yang lebih banyak berkunjung dari pada wisatawan mancanegara. Padahal dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga merupakan kawasan wisata yang cukup dilirik oleh para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Untuk itu sektor kepariwisataan secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu sektor andalan dalam kegiatan perekonomian daerah. Berkembangnya kegiatan pariwisata disuatu daerah akan

memberikan pengaruh dan dorongan pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan peluang usaha.

Namun dalam mengembangkan kepariwisataannya masih menemukan masalah, yang mana beberapa potensi tersebut belum dikelola dengan maksimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang banyak dan kontribusi ke masyarakat maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti penyediaan akomodasi sarana dan prasarana pariwisata lainnya masih sangat terbatas, kurangnya pihak swasta berinvestasi di bidang pariwisata, minimnya dukungan infrastruktur, belum maksimalnya kegiatan pemasaran atau promosi, keterpaduan pembangunan dari masing-masing stakeholder belum maksimal, dan paket-paket untuk mendukung pengembangan pariwisata belum dikembangkan dengan baik.

Salah satu bukti yaitu sulitnya akses transportasi dari satu destinasi wisata ke destinasi wisata lainnya, contohnya apabila wisatawan lokal maupun wisatawan asing ingin berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Pulau Benan atau pun ke destinasi lainnya disekitar akses transportasi sangat sulit didapatkan karena hanya ada satu kapal saja yang menyinggahi pulau tersebut itu pun masih ada kemungkinan tidak singgah. Selain itu ada beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Lingga belum tersentuh baik infrastruktur sarana dan prasarana. (Hasil wawancara, 20 Mei 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga, yang menyatakan bahwa:

“pihaknya akan fokus terhadap pemeliharaan fasilitas pariwisata, hal tersebut mengingat banyaknya fasilitas wisata yang telah dibangun namun minim perawatannya hingga kini. Sejumlah fasilitas wisata seperti gazebo dan cotage Desa Penaah terbengkalai tanpa perawatan.

Begitu juga fasilitas pariwisata di pantai Pasir Panjang yang mana pintu masuk lokasi wisata, cagar budaya Benteng Kuala Daik, jalan menuju objek wisata dan semenisasi Benteng Bukit Cening yang belum terealisasi dan sejumlah aset serta fasilitas lainnya.” (Diakses pada 29 Desember 2016, www.batampos.co.id)

Oleh karena itu untuk mendukung potensi yang dimiliki tersebut, Pemerintah Kabupaten Lingga berusaha mengembangkan dengan dibentuknya beberapa kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga.

Tabel I.2
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Lingga sebagai Salah Satu Destinasi Pariwisata Unggulan di Kepulauan Riau yang Berpayungkan Bunda Tanah Melayu”			
Misi I: Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan penataan dan pengelolaan objek wisata.	<p>Tertata dan terkelolanya objek wisata</p> <p>tercapainya peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah yang ditandai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terealisasinya produk pariwisata yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif. - terciptanya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat 	<p>Mengoptimalkan pengembangan potensi wisata dengan memanfaatkan predikat sebagai Bunda Tanah Melayu, kedekatan dengan Bintan dan Batam, keterkaitan hubungan sejarah dengan Negara tetangga dan sinergis dengan program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.</p>	<p>Peningkatan pengembangan sarana prasarana dan SDM kepariwisataan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan Kemitraan
Misi II: Meningkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur			
Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan kebudayaan yang profesional, berbudaya dan berimtaq serta meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang profesional, berbudaya dan berimtaq. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung utama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang guna memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan adat dan budayamelayu serta didukung dengan regulasi lokal yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan - Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
pembangunan infrastruktur.	bidang kebudayaan dan kepariwisataan.	2. Meningkatkan investasi dibidang pariwisata dengan tetap memelihara wilayah yang kondusif, keramah tamahan masyarakat, eksploitasi SDA yang terkendali dan peningkatan sadar wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan disiplin aparatur 2. Peningkatan pengembangan sarana prasarana dan SDM kepariwisataan - Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan Kemitraan

Misi III: Meningkatkan Pelestarian dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Melayu

Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan sejarah dan budaya serta penerapan nilai-nilai budaya melayu.	Terwujudnya pelestarian sejarah dan budaya melayu serta kesadaran masyarakat di dalam penerapan nilai-nilai budaya melayu.	Peningkatan pelestarian dan penerapan nilai-nilai luhur budaya melayu sebagai payung budaya yang lain guna menangkal pengaruh negatif budaya luar.	Peningkatan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya melayu, sejarah dan purbakala. <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan nilai budaya - Pengelolaan kekayaan budaya - Pengelolaan keragaman budaya - Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
--	--	--	--

Sumber: Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Tahun 2015”**

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lingga. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebanyak 9 Orang.

HASIL DAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Tahun 2015. Maka penulis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (Agustiono, 2012:142 tentang implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustiono, 2012:142) ada 6 variabel, yaitu:

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012:142), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana standar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Standar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Adapun indikator dari variabel tersebut yaitu:

1. *Standar Operasional Prosedur (SOP)*

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga belum memiliki SOP sebagai pedoman pelaksana pada tahun 2015. Sehingga ini berdampak pada terjadinya multiinterpretasi atau distorsi antar berbagai pihak yang mudah menimbulkan konflik antar agen

implementasi. Jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mereka berdasar kepada kebijakan yang tercantum di dalam Renstra Dinas.

B. Sumber Daya

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup sumberdaya manusia yang mana dalam implementasi kebijakan di sini dimaksudkan sebagai orang atau sekelompok orang selaku agen pelaksana kebijakan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah: sumberdaya finansial dan selain itu sumberdaya waktu. Adapun beberapa indikator dari variabel tersebut yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini yaitu pegawai/staf dilingkungan Pemerintah Daerah maupun masyarakat kondisi kepegawaian atau staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga memiliki jumlah total pegawai 53 orang yang terdiri atas 20 orang PNS, 5 orang CPNS, 7 orang PTT, dan 21 orang Tenaga Harian Lepas. Namun masih adanya faktor penghambat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lingga ini dikarenakan masih minimnya Sumber Daya Manusia yang tersedia dilingkungan masyarakat.

2. Sumber Daya Finansial

Dalam hal ini anggaran yang di dapatkan melalui dana alokasi khusus untuk Dinas melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 berkenaan anggaran di SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lingga yang mana Retribusi tempat Rekreasi dan Olagraga pada tahun 2015 dengan target sebesar Rp. 74.000.000 namun pada kenyataannya dana yang diberikan tidak mencukupi yaitu hanya sebesar 45.739.800.

3. Sumber Daya Waktu

Kabupaten Lingga mengalami defisit pada saat itu jadi program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga tidak sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Program-program kegiatan yang terlaksana yaitu Tradisi Mandi Syafar, Lingga Fishing Festival, Tour, dan Festival Perahu layar.

C. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya. Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh VanMeter dan Van Horn, maka tidak lepas dari struktur birokrasi. Adapun indikator dari variabel tersebut yaitu:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting terhadap implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Dari struktur organisasi ini kita dapat melihat Karakteristik agen pelaksana bagaimana hubungan yang terjalin antar unit dalam Dinas serta hubungan Dinas

Pariwisata dengan instansi lain. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sebagai agen pelaksana di internal Dinas sudah berkerja dengan baik, baik individual maupun tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, baik dalam bidang kerjanya maupun antar bidang kerja.

D. Sikap dan Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun standar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Adapun Indikator dari variable tersebut yaitu:

1. Respon Pelaksana terhadap Pengembangan Potensi Pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat respon tersebut tampak bahwa masyarakat sangat mendukung dengan diadakannya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didaerahnya. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti rangkaian pembinaan, sosialisasi serta pelatihan yang dilakukan pemerintah dibuktikan dengan berhasilnya kelompok sadar wisata memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Cipta Award dan penghargaan sebagai Desa Citra Pesona Wisata yang pengelolaan desa wisata yang berbasis lingkungan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

E. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan

akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Adapun beberapa indikator-indikator dari variabel tersebut yaitu:

1. Koordinasi/Kerjasama Dengan Stakeholder Atau Instansi Terkait

Koordinasi yang terjadi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dengan Dinas terkait sudah cukup baik seperti adanya koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu dalam proses perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya, Dinas Perhubungan dalam rencana pembangunan jalan, rencana trayek transportasi laut, dan Diskominfo yang membahas tentang penyediaan jaringan provider telekomunikasi yang bertujuan agar wisatawan selalu terhubung dengan jaringan internet dan sebagai media akses untuk mempromosikan wisata daerah.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Promosi mengenai Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Lingga

Adanya kegiatan sosialisasi dan promosi. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga telah berupaya sebaik mungkin untuk mengadakan sosialisasi dan promosi tersebut melalui berbagai cara seperti website, spanduk, pemflat dan lain sebagainya.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan

kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Adapun beberapa indikator-indikator dari variabel tersebut yaitu:

1. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi yang mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sudah berupaya untuk menyiapkan segala kebutuhan pengembangan pariwisata seperti, dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan sarana, prasarana pendukung di lokasi wisata ini berguna agar banyaknya kunjungan wisatawan yang berdatangan ke Objek Wisata yang ada di Kabupaten Lingga.

2. Lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial, Keberhasilan dari Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial yaitu mencakup dukungan dan pandangan maupun keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga.

3. Lingkungan Politik

Lingkungan Politik, yang mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam hal ini dalam membuat suatu kegiatan itu tidak terlepas dari dukungan para elit politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa masih adanya masalah atau hambatan dalam implementasi kebijakan

pembangunan kepariwisataan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga khususnya dalam pengembangan potensi pariwisata tahun 2015. Hal ini pun dinilai dengan menggunakan tolak ukur dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012:142) yang terdiri dari 6 Variabel. Adapun variabel dari teori tersebut yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam hal ini pada Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga belum memiliki SOP jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mereka berdasar kepada kebijakan yang tercantum di dalam Renstra Dinas.

2. Sumberdaya

Sumberdaya disini terbagi menjadi 3 yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial dan Sumber Daya Waktu. *Pertama*, Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini yaitu pegawai/staf dilingkungan Pemerintah Daerah maupun masyarakat kondisi kepegawaian atau staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga memiliki jumlah total pegawai 53 orang. Namun masih adanya faktor penghambat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lingga ini dikarenakan masih minimnya Sumber Daya Manusia yang tersedia dilingkungan masyarakat. *Kedua*, Sumber Daya Finansial yaitu berupa dukungan anggaran dalam hal ini anggaran tersebut di dapatkan melalui dana alokasi khusus untuk Dinas melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lingga

Tahun 2015 berkenaan anggaran di SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga yang mana Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 45.739.800. *Ketiga*, Sumber Daya Waktu, dikarenakan Kabupaten Lingga mengalami defisit pada saat itu jadi program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga tidak sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Program-program kegiatan yang terlaksana yaitu Tradisi Mandi Syafar, Lingga Fishing Festival, Tour, dan Festival Perahu layar.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sebagai agen pelaksana di internal Dinas sudah bekerja dengan baik, baik individual maupun tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, baik dalam bidang kerjanya maupun antar bidang kerja.

4. Sikap dan Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Respon para pelaksana dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lingga dilihat *Pertama*, adanya dukungan dari pelaksana internal Pemerintah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga, *Kedua*, antusiasme masyarakat dalam menerima program pengembangan pariwisata di Daerah, *Ketiga*, adanya pengawasan Pemerintah yang bersifat melekat pada pengembangan pariwisata di Daerah.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pertama, Koordinasi/kerjasama dengan stakeholder atau instansi terkait yang mana koordinasi yang terjadi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lingga dengan Dinas terkait sudah cukup baik seperti adanya koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu dalam proses perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya, Dinas Perhubungan dalam rencana pembangunan jalan, rencana trayek transportasi laut, dan Diskominfo yang membahas tentang penyediaan jaringan provider telekomunikasi yang bertujuan agar wisatawan selalu terhubung dengan jaringan internet dan sebagai media akses untuk mempromosikan wisata daerah. *Kedua*, adanya kegiatan sosialisasi dan promosi. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga telah berupaya sebaik mungkin untuk mengadakan sosialisasi dan promosi tersebut melalui berbagai cara seperti website, spanduk, pemflat dan lain sebagainya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pertama, dari Lingkungan Ekonomi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sudah berupaya untuk menyiapkan segala kebutuhan pengembangan pariwisata seperti, dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan sarana, prasarana pendukung di lokasi wisata ini berguna agar banyaknya kunjungan wisatawan yang berdatangan ke Objek Wisata yang ada di Kabupaten Lingga. *Kedua*, Lingkungan Sosial, Keberhasilan dari Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial yaitu mencakup dukungan dan pandangan maupun keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang

dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga. *Ketiga*, Lingkungan Politik, yang mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam hal ini dalam membuat suatu kegiatan itu tidak terlepas dari dukungan para elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Awang, Azam dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fandeli, Chafid. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Kencana, Syafiie Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Meleong, J Luxy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oka, A Yoeti. 2001. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gde dan I ketut,Surya Diarta,SP,MA.2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata* Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Spillanne, James J, 2002, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Jakarta: Kanisius.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifudin, 2008, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan & Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga 2010-2015

Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2016

Kabupaten Lingga Dalam Angka 2016

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga

C. Skripsi & Jurnal

Revita, 2017. “*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Kasus Pengembangan Objek Wisata Batu Ampar Kecamatan Singkep Tahun 2015)*”. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Trisriati, Esi. 2015. “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang No. 6 Tahun 2008 Pasal 25 tentang pembinaan usaha pariwisata di Kota Tanjung Pinang*”. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

D. Website

Batam Pos, <http://batampos.co.id/2016/11/12/2017-pariwisata-lingga-berbenah/>, diakses pada 29 Desember 2016.

Radar Kepri, <http://radarkepri.com/penaah-dan-benan-wakili-kepri-lomba-desa-wisata-tingkat-nasional/>, diakses pada 19 Desember 2017